



Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam Pengarsipan Digital di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Cahya Arkania Universitas Muhammadiyah Jakarta arkaniacahya@gmail.com Irmina Sri Ekowati Universitas Muhammadiyah Jakarta Djoni Gunanto Universitas Muhammadiyah Jakarta	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Arkania, C., Ekowati, I. S., & Gunanto, D. (2026). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam Pengarsipan Digital di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),2332-2340.

Abstrak

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong instansi publik untuk menerapkan sistem pengelolaan arsip berbasis elektronik, termasuk melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Namun, implementasi pengarsipan digital di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) masih menghadapi berbagai tantangan, yang ditunjukkan oleh penurunan hasil pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pengarsipan digital di lingkungan Lemhannas RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI secara umum telah berjalan cukup baik dan mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta mendukung penerapan paperless office. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa perbedaan kompetensi digital pegawai, keterbatasan anggaran, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan belum tersedianya regulasi internal mengenai tata naskah dinas elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SRIKANDI tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola transformasi digital.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, SRIKANDI, Pengarsipan Digital, Transformasi Digital, Kearsipan Elektronik.

Abstract

Digital transformation in public administration has encouraged government institutions to implement electronic archival management systems, including the Integrated Dynamic Archival Information System (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi SRIKANDI). However, the implementation of digital archiving at the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Lemhannas RI) still faces several challenges, as indicated by the decline in archival supervision results issued by the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) in 2025. This study aims to analyze the implementation of the SRIKANDI application in digital archiving at Lemhannas RI. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, while data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana and analyzed through George C. Edward III's policy implementation framework. The findings indicate that the implementation of SRIKANDI has generally been effective in improving administrative efficiency and supporting the paperless office concept. Nevertheless, several challenges remain, including disparities in digital competencies among employees, budget constraints, concerns regarding data security, and the absence of internal regulations governing electronic official correspondence. This study concludes that the successful implementation of SRIKANDI depends not only on technological availability but also on organizational readiness in managing digital transformation.

Keywords: Policy implementation, SRIKANDI, Digital archiving, Digital Transformation, Archival Governance.

A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah mendorong berbagai instansi negara untuk mengubah sistem administrasi konvensional menjadi sistem berbasis elektronik yang lebih efektif, cepat, dan akuntabel. Salah satu bentuk transformasi tersebut terlihat pada pengelolaan arsip dinamis melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Secara global, digitalisasi arsip menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi karena mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses temu kembali dokumen, serta meminimalkan risiko kehilangan arsip fisik.

Di Indonesia, implementasi pengarsipan digital diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, pemerintah menetapkan aplikasi SRIKANDI sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengelolaan arsip dan persuratan secara digital, terintegrasi, serta aman. Aplikasi ini memfasilitasi pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan temu kembali dokumen elektronik sehingga meningkatkan efisiensi administrasi serta akuntabilitas pengelolaan arsip (Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, 2021). Penelitian oleh Hadijah & Rahman (2024) menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI mampu mendukung pengelolaan arsip elektronik secara lebih efektif melalui integrasi proses persuratan dan pengarsipan dalam satu sistem digital. Penerapan aplikasi ini menjadi penting di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI yang menghasilkan berbagai dokumen strategis negara sehingga memerlukan pengelolaan arsip yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Meskipun kerangka regulasi pengarsipan digital telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala, termasuk di Lemhannas RI. Berdasarkan Pengumuman Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor AK.01.00/2/2025 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025, Lemhannas RI memperoleh kategori CC (Cukup) (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025) dengan rentang nilai 50–60 dari skala 100 (Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019). Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan hasil pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga mengindikasikan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Lemhannas RI masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi pengarsipan digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa transformasi digital di bidang kearsipan tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan. Penelitian

Alhadi dan Rahmawati (2024) misalnya, menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SRIKANDI dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, pemahaman pengguna, ketersediaan perangkat pendukung, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Dalam konteks Lemhannas RI, penurunan hasil pengawasan kearsipan perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi efektivitas administrasi, keamanan informasi, dan tata kelola data strategis negara. Apabila berbagai kendala tersebut tidak segera diatasi, kualitas pengelolaan arsip digital berpotensi menurun dan menghambat terwujudnya tata kelola kearsipan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana implementasi aplikasi SRIKANDI dilaksanakan serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mendukung pengarsipan digital di Lemhannas RI.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan sejumlah penelitian yang mengkaji implementasi aplikasi SRIKANDI pada instansi pemerintah. Penelitian Fadilah & Putra (2024) menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI mampu meningkatkan efisiensi operasional administrasi hingga 35% melalui otomatisasi persuratan dan pengurangan penggunaan arsip fisik. Selain itu, penelitian Dai et al., (2024) menemukan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI masih menghadapi kendala pada aspek integrasi sistem dan kesiapan pengguna dalam pengoperasian aplikasi digital. Penelitian lain yang dilakukan Dwi Puji Anggraini et al., (2025) menunjukkan bahwa rendahnya keterampilan teknis pegawai, gangguan sistem, dan keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan dalam pengelolaan arsip digital. Oleh karena itu, penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur digital, serta penguatan koordinasi dan komitmen organisasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip elektronik di instansi pemerintah.

Meskipun berbagai penelitian mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI telah dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pemerintah daerah, seperti pemerintah kabupaten/kota, dinas kearsipan, maupun kementerian. Penelitian yang mengkaji implementasi aplikasi SRIKANDI pada lembaga strategis pemerintah non-kementerian, khususnya Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), masih relatif terbatas. Selain itu, studi sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis implementasi, sedangkan kajian yang menganalisis keterkaitan antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi SRIKANDI masih belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Lemhannas RI dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengarsipan digital. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana implementasi aplikasi SRIKANDI mendukung pengelolaan arsip digital di lingkungan Lemhannas RI.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam pengarsipan digital di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan dalam konteks organisasi secara alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan arsip dan penggunaan aplikasi SRIKANDI, sedangkan observasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan arsip elektronik dan proses administrasi berbasis aplikasi. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman penggunaan aplikasi SRIKANDI, laporan pengawasan kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta dokumen lain yang relevan dengan pengarsipan digital. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI dalam mendukung tata kelola arsip elektronik di lingkungan Lemhannas RI (Creswell & Creswell, 2023).

Penelitian ini mengoperasikan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Subarsono, 2012) dengan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi aplikasi SRIKANDI serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengarsipan digital di lingkungan Lemhannas RI. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael

Huberman, dan Johnny Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles et al., 2014)

C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang kearsipan. Sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Lemhannas RI mulai menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) guna mendukung pengelolaan persuratan dan arsip secara elektronik. Penerapan aplikasi tersebut diawali melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis sejak tahun 2022, kemudian diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 April 2024. Sejak saat itu, seluruh unit kerja di lingkungan Lemhannas RI telah memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam proses administrasi, mulai dari penyusunan naskah dinas, disposisi, distribusi surat, hingga penyimpanan arsip secara digital.

Untuk menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan di Lemhannas RI, hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selama periode 2022–2025 dapat dilihat pada Grafik berikut:



Gambar 1. Tren Hasil Pengawasan Kearsipan Lemhannas RI Tahun 2022–2025

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2022–2025.

Berdasarkan Gambar 1, Lemhannas RI memperoleh kategori BB (Sangat Baik) secara konsisten pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Namun, pada tahun 2025 capaian tersebut menurun menjadi kategori CC (Cukup). Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penurunan capaian tersebut berkaitan dengan berbagai tantangan dalam implementasi pengarsipan digital di lingkungan Lemhannas RI. Beberapa tantangan yang teridentifikasi antara lain belum meratanya kompetensi digital pegawai, keterbatasan dukungan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan, serta belum tersedianya regulasi internal yang secara khusus mengatur tata naskah dinas elektronik berbasis SRIKANDI. Selain itu, proses adaptasi terhadap sistem pengarsipan digital yang masih berlangsung di sejumlah unit kerja turut memengaruhi efektivitas penyelenggaraan kearsipan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di bidang kearsipan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mendukung implementasinya secara berkelanjutan.

Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, implementasi aplikasi SRIKANDI telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan administrasi di Lemhannas RI. Proses persuratan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga lebih cepat, efisien, dan mudah ditelusuri kembali. Selain mendukung penerapan konsep *paperless office*, aplikasi SRIKANDI juga memberikan fleksibilitas bagi pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan melalui skema *Work From Home* (WFH)

maupun *Work From Anywhere* (WFA). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas proses administrasi sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan kerja. Namun demikian, berbagai manfaat tersebut baru dapat dicapai secara optimal apabila didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan yang memadai (Haug et al., 2024).

Berbagai dinamika yang muncul selama penerapan aplikasi SRIKANDI di Lemhannas RI memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digital tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi pengarsipan digital di lingkungan Lemhannas RI.

a. Komunikasi dalam Implementasi Aplikasi SRIKANDI

Upaya penyampaian informasi mengenai penggunaan aplikasi SRIKANDI di Lemhannas RI dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal. Sosialisasi dan pelatihan teknis menjadi instrumen utama yang digunakan untuk memperkenalkan aplikasi kepada seluruh pegawai. Pada tahap awal implementasi, lebih dari 100 operator dari berbagai unit kerja mengikuti kegiatan pelatihan guna meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan aplikasi. Koordinasi antaradmin dan pengguna juga berlangsung secara intensif melalui rapat koordinasi, grup komunikasi internal, serta layanan pendampingan yang disediakan oleh unit pengelola. Meskipun proses komunikasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan, masih terdapat pegawai yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital, terutama pegawai yang selama ini terbiasa menggunakan mekanisme administrasi konvensional. Perbedaan tingkat pemahaman tersebut menyebabkan proses adaptasi tidak berlangsung secara seragam di seluruh unit kerja.

Intensitas komunikasi yang dibangun Lemhannas RI mencerminkan upaya membangun kesamaan persepsi di antara para implementor, kondisi yang menjadi prasyarat bagi transmisi kebijakan agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pelaksana. Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara bertahap terbukti membantu pegawai memahami tujuan serta prosedur penggunaan aplikasi SRIKANDI. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media pembelajaran organisasi dalam menghadapi perubahan sistem kerja, sebagaimana ditegaskan oleh Haug et al., (2024) bahwa komunikasi organisasi memiliki peran strategis dalam memfasilitasi perubahan digital melalui proses pembelajaran dan pengurangan resistensi pegawai. Namun, masih ditemukannya perbedaan pemahaman antarpegawai mengindikasikan bahwa intensitas komunikasi saja tidak cukup apabila tidak disertai kejelasan regulasi. Ketidadaan regulasi internal mengenai tata naskah dinas elektronik menyebabkan sebagian unit kerja menafsirkan prosedur administrasi secara berbeda, sehingga konsistensi implementasi antarunit belum sepenuhnya terwujud.

Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan digital ditentukan oleh dua hal yang tidak dapat dipisahkan: intensitas penyampaian pesan dan kejelasan landasan aturan yang menjadi acuan bersama. Kim et al., (2024) menegaskan bahwa transformasi digital di sektor publik membutuhkan komunikasi yang intensif agar seluruh aktor memiliki pemahaman yang seragam terhadap prosedur dan tujuan perubahan, sementara Rifai dan Sugiyanto, (2024) menambahkan bahwa sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan merupakan faktor yang secara langsung menentukan keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI. Dengan demikian, komunikasi dalam konteks ini tidak semata berfungsi sebagai media penyampaian informasi, melainkan sebagai instrumen *change management* yang memerlukan dukungan regulasi agar dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

b. Sumber Daya dalam Implementasi Aplikasi SRIKANDI

Dukungan sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di Lemhannas RI. Secara umum, setiap unit kerja telah memiliki admin atau pengelola aplikasi yang bertanggung jawab terhadap proses persuratan elektronik. Ketersediaan perangkat pendukung, seperti komputer, laptop, jaringan internet, dan telepon seluler, juga dinilai cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan pengarsipan digital. Walaupun demikian, kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya merata. Tidak seluruh unit kerja didukung oleh arsiparis profesional, sementara tingkat literasi digital antarpegawai masih beragam. Selain itu,

efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2025 turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan pendukung, seperti pembinaan dan audit internal di bidang kearsipan, yang berkontribusi langsung terhadap penurunan nilai ASKE (Audit Sistem Kearsipan Eksternal) mengingat komponen audit internal menyumbang 40% dari total penilaian.

Ketersediaan sumber daya secara kuantitatif belum tentu menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak disertai kapasitas yang memadai. Perbedaan kemampuan digital antarpegawai memperlihatkan bahwa transformasi digital pada hakikatnya adalah transformasi kapasitas manusia, bukan sekadar pengadaan teknologi. Keberadaan perangkat dan infrastruktur yang cukup tidak akan berdampak optimal apabila pengguna tidak memiliki kompetensi untuk mengoperasikannya secara efektif. Syed et al., (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur merupakan faktor utama kegagalan transformasi digital di sektor publik, sementara Yosefa Freinademetz Aso Ladapase et al., (2025) menegaskan hal serupa dalam konteks implementasi SRIKANDI secara khusus.

Persoalan anggaran menambah kompleksitas permasalahan sumber daya yang dihadapi Lemhannas RI. Efisiensi anggaran tahun 2025 mengakibatkan sejumlah kegiatan kearsipan strategis tidak dapat dilaksanakan, termasuk koordinasi penyerahan dan pemusnahan arsip bersama ANRI yang memerlukan dukungan finansial tersendiri. Kondisi ini mencerminkan dilema yang kerap dihadapi organisasi publik: di satu sisi dituntut melakukan digitalisasi demi efisiensi, namun di sisi lain proses digitalisasi itu sendiri memerlukan investasi yang tidak sedikit. Haug et al., (2024) menegaskan bahwa investasi berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi digital aparatur merupakan prasyarat penting keberhasilan implementasi kebijakan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya baik manusia maupun anggaran perlu diperlakukan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pos pengeluaran yang dapat dipangkas dalam kondisi efisiensi.

c. Disposisi dalam Implementasi Aplikasi SRIKANDI

Proses implementasi aplikasi SRIKANDI di Lemhannas RI tidak terlepas dari dinamika sikap dan penerimaan para pengguna. Pada fase awal penerapan, masih terdapat pegawai, khususnya pada level pimpinan dan pegawai senior, yang menunjukkan keraguan terhadap efektivitas sistem digital. Keraguan tersebut umumnya berkaitan dengan kebiasaan menggunakan sistem administrasi manual yang telah berlangsung dalam waktu lama serta anggapan bahwa penggunaan aplikasi digital memerlukan proses adaptasi yang cukup kompleks. Seiring meningkatnya intensitas penggunaan, sikap tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Tercatat sekitar 70–80% pimpinan telah memberikan dukungan terhadap penggunaan SRIKANDI karena dinilai mampu mempercepat proses persuratan, mempermudah pelacakan dokumen, serta meningkatkan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Di samping itu, masih terdapat kekhawatiran terkait keamanan data digital, terutama setelah terjadinya gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sehingga beberapa pengguna masih mempertahankan mekanisme manual untuk dokumen tertentu.

Resistensi awal yang muncul bukan semata-mata bentuk penolakan, melainkan refleksi dari ketidaksiapan adaptasi terhadap perubahan pola kerja yang telah mengakar. Fenomena ini lazim terjadi dalam transformasi digital sektor publik dan cenderung berkurang seiring pengalaman langsung pengguna dalam merasakan manfaat sistem. Sikap implementor dalam hal ini tidak bersifat statis, ia dapat dibentuk dan dikembangkan melalui pengalaman penggunaan yang positif serta dukungan organisasi yang konsisten. Pengalaman empiris di Lemhannas RI memperlihatkan bahwa persepsi terhadap manfaat teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen implementor: semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin tinggi kecenderungan pengguna untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam aktivitas kerja sehari-hari. Haug et al., (2024) menegaskan bahwa persepsi manfaat merupakan faktor penting dalam membangun komitmen implementor selama proses transformasi digital, sehingga strategi peningkatan disposisi perlu diarahkan pada upaya memperluas pengalaman positif pengguna secara terencana.

Aspek lain yang perlu dicermati adalah munculnya isu kepercayaan terhadap keamanan informasi (*digital security trust*) sebagai dimensi baru dalam dinamika disposisi. Kekhawatiran pasca-insiden PDNS memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap sistem digital tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi manfaat, tetapi juga oleh persepsi risiko. Mökander dan Schroeder (2024) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi digital di sektor publik sangat dipengaruhi oleh kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan akuntabilitas sistem, sementara Alhadi dan Rahmawati (2024) menemukan bahwa persepsi risiko dan rasa tidak aman dapat secara langsung memengaruhi tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi dalam konteks implementasi SRIKANDI. Implikasinya, upaya membangun disposisi positif tidak cukup hanya dengan

menunjukkan manfaat aplikasi, tetapi juga harus disertai jaminan keamanan sistem yang konkret dan terukur agar kepercayaan pengguna dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

d. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Aplikasi SRIKANDI

Pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di Lemhannas RI didukung oleh struktur birokrasi yang telah dibentuk secara formal melalui penunjukan admin atau pengelola aplikasi pada masing-masing unit kerja. Pembagian tugas tersebut disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku dan diperbarui secara berkala mengikuti dinamika kepegawaian, seperti mutasi, promosi, maupun pensiun pegawai. Selain itu, proses persuratan elektronik yang dijalankan melalui aplikasi tetap mengikuti hierarki organisasi sehingga mekanisme pertanggungjawaban administratif tetap terjaga. Dalam praktiknya, koordinasi antarunit kerja berlangsung melalui berbagai saluran, baik secara formal maupun informal. Rapat koordinasi, grup komunikasi internal, koordinasi dengan unit Tata Usaha, serta jejaring admin SRIKANDI tingkat nasional menjadi sarana utama dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun administratif. Meskipun mekanisme koordinasi telah berjalan, Lemhannas RI belum memiliki regulasi internal yang secara khusus mengatur tata naskah dinas elektronik berbasis SRIKANDI.

Kejelasan pembagian tugas dan penunjukan admin pada setiap unit kerja menunjukkan bahwa struktur organisasi Lemhannas RI pada dasarnya telah mengakomodasi kebutuhan teknis implementasi SRIKANDI. Proses persuratan elektronik yang mengikuti hierarki yang sama dengan mekanisme manual memudahkan adaptasi pegawai karena tidak menuntut perubahan alur kerja secara mendasar. Namun demikian, efektivitas struktur birokrasi tidak semata ditentukan oleh kejelasan pembagian tugas, melainkan juga oleh keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mampu menjamin konsistensi pelaksanaan di seluruh unit. Belum tersedianya regulasi internal mengenai tata naskah dinas elektronik menunjukkan bahwa Lemhannas RI masih berada pada tahap *institutional adjustment*, fase di mana sistem teknologi telah beroperasi, tetapi perangkat kelembagaan yang mengikatnya belum sepenuhnya terbentuk. Ramudin et al., (2024) menegaskan bahwa kepastian hukum dan keberadaan SOP merupakan faktor yang secara langsung memengaruhi efektivitas implementasi aplikasi SRIKANDI, sehingga ketiadaan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan variasi prosedur antarunit yang pada akhirnya dapat melemahkan konsistensi implementasi secara keseluruhan.

Pada dimensi koordinasi dan pengawasan, Lemhannas RI telah membangun mekanisme yang cukup memadai, baik melalui grup komunikasi internal maupun keterhubungan dengan jejaring admin SRIKANDI tingkat nasional. Mekanisme ini memungkinkan informasi mengenai gangguan sistem atau pembaruan fitur dapat disebarluaskan secara cepat kepada seluruh unit kerja. Meskipun demikian, Haug et al., (2024) mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan penyesuaian struktur organisasi yang bersifat menyeluruh, bukan hanya pada level teknis operasional. Syed et al., (2023) lebih lanjut menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antarunit dan belum adaptifnya regulasi organisasi merupakan salah satu penyebab utama kegagalan transformasi digital di sektor publik. Oleh karena itu, penyusunan regulasi internal terkait tata naskah dinas elektronik perlu diprioritaskan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepastian prosedural dan menjamin konsistensi implementasi SRIKANDI di seluruh unit kerja Lemhannas RI.

Tabel 1. Hasil Analisis Implementasi Aplikasi SRIKANDI Berdasarkan Teori Edward III

Indikator Edward III	Temuan Utama	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Komunikasi	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan telah dilaksanakan secara berkelanjutan	Sosialisasi, helpdesk, grup koordinasi internal	Perbedaan tingkat pemahaman dan adaptasi pegawai
Sumber Daya	Infrastruktur dan SDM tersedia, tetapi belum merata	Ketersediaan perangkat TIK dan admin unit kerja	Kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan anggaran
Disposisi	Sebagian besar implementor mendukung penggunaan SRIKANDI	Dukungan pimpinan dan persepsi manfaat aplikasi	Resistensi awal dan kekhawatiran terhadap keamanan data
Struktur Birokrasi	Pembagian tugas dan koordinasi telah berjalan cukup baik	Penunjukan admin dan koordinasi antarunit	Belum adanya regulasi internal terkait tata naskah dinas elektronik

Berdasarkan Tabel 1, implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Lemhannas RI secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan implementasi didukung oleh komunikasi yang intensif, ketersediaan sumber daya pendukung, sikap positif implementor, serta mekanisme koordinasi yang telah berjalan di setiap unit kerja. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain perbedaan tingkat literasi digital, keterbatasan dukungan anggaran, kekhawatiran terhadap keamanan informasi, serta belum tersedianya regulasi internal mengenai tata naskah dinas elektronik berbasis SRIKANDI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di bidang kearsipan memerlukan dukungan organisasi yang komprehensif, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan.

D. Kesimpulan

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam pengarsipan digital di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan administrasi kearsipan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi SRIKANDI didukung oleh komunikasi yang intensif, ketersediaan infrastruktur teknologi, sikap positif implementor, serta mekanisme koordinasi yang telah berjalan di setiap unit kerja. Namun demikian, implementasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan tingkat literasi digital pegawai, keterbatasan dukungan anggaran, kekhawatiran terhadap keamanan informasi, dan belum tersedianya regulasi internal mengenai tata naskah dinas elektronik berbasis SRIKANDI.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola transformasi digital secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital pegawai, penyusunan regulasi internal, penguatan pembinaan kearsipan, serta peningkatan tata kelola keamanan informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung keberhasilan pengarsipan digital di lingkungan Lemhannas RI.

E. Referensi

- Alhadi, M., & Rahmawati, R. (2024). Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Arsip Nasional Republik Indonesia. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 2(2), 167–185. <https://doi.org/10.61332/antasena.v2i2.243>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2022). *PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2022* (pp. 1–17). https://anri.go.id/storage/files/pengumuman_tentang_hasil_pengawasan_kearsipan_tahun_2022_1670466694.pdf
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2023). *PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2023* (pp. 1–27). https://www.anri.go.id/storage/files/pengumuman_nomor_ak.01.00232023_tentang_hasil_pengawasan_kearsipan_tahun_2023_1702608957.pdf
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2024). *PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2024* (pp. 1–25). https://anri.go.id/storage/files/pengumuman_nomor_ak.01.00302024_tentang_hasil_pengawasan_kearsipan_tahun_2024_1736311772.pdf
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2025). *PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2025* (pp. 1–39). <https://www.anri.go.id/download/pengumuman-nomor-ak.01.0012025-tentang-hasil-pengawasan-kearsipan-tahun-2025-1767153680>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Dai, R. H., Padiku, I. R., & Raupu, R. (2024). Penerapan Metode UTAUT Dalam Menganalisis Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). 4(1), 87–96.
- Dwi Puji Anggraini, Afifuddin, & Taufiq Rahman Ilyas. (2025). *EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DALAM DIGITALISASI ARSIP (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu)*. 19(4), 19–29.
- Fadilah, M., & Putra, P. (2024). *Transformasi Praktik Pengelolaan Arsip Dinamis melalui Aplikasi Srikandi Dinas Perpustakaan dan Arsip Purworejo: Studi Kualitatif Efek Impelentasi pada Efisiensi dan Persepsi Pengguna*. 282–295.
- Hadijah, A. R. (2024). *IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI*

- (SRIKANDI) PADA KANTOR KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG. 7, 1386–1395.
- Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector: a systematic review and research agenda. *Public Management Review*, 26(7), 1963–1987. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917>
- Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. (2019). *PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KEARSIPAN* (Number 806, pp. 1–59).
- Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). *PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK* (pp. 1–24).
- Kim, S., Fan, B., Yang, W. Y., Ramey, J., Fox, S. E., Zhu, H., Zimmerman, J., & Eslami, M. (2024). Public Technologies Transforming Work of the Public and the Public Sector. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3663384.3663407>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mökander, J., & Schroeder, R. (2024). Artificial Intelligence, Rationalization, and the Limits of Control in the Public Sector: The Case of Tax Policy Optimization. *Social Science Computer Review*, 42(6), 1359–1378. <https://doi.org/10.1177/08944393241235175>
- Ramudin, R. P., Ramli, A. M., & Rosmana, H. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 17(2), 142–158. <https://doi.org/10.22146/khazanah.93331>
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Sugiyanto, M. R. (2024). *Implementation Of Srikandi Application: Paperless-Based Digital Transformation Of Archives*. 9(2), 314–326.
- Syed, R., Bandara, W., & Eden, R. (2023). Public Sector Digital Transformation Barriers: A Developing Country Experience. *Information Polity*, 28(1), 5–27. <https://doi.org/10.3233/IP-220017>
- Yosefa Freinademetz Aso Ladapase, Jacoba D. Niga, Belandina L. Long, & Ardy Y. Pandie. (2025). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KUPANG. *Jurnal Education and Goverment Wiyata*, 3(2), 474–486.